

**IMPLEMENTASI PERAN KOMITE MADRASAH SEBAGAI  
PEMBERI PERTIMBANGAN (*ADVISORY AGENCY*) DI  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI LIPAT KAIN  
KABUPATEN KAMPAR**



**Oleh**

**SUSMAINI LESTARI**

**NIM. 10813002300**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1434 H/2012 M**

**IMPLEMENTASI PERAN KOMITE MADRASAH SEBAGAI  
PEMBERI PERTIMBANGAN (*ADVISORY AGENCY*) DI  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI LIPAT KAIN  
KABUPATEN KAMPAR**

Skripsi

Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan Islam  
(S.Pd.I.)



Oleh

**SUSMAINI LESTARI**

**NIM. 10813002300**

**PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1434 H/2012 M**

## ABSTRAK

**Susmaini Lestari (2012) : Implementasi Peran Komite Madrasah Sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain Kabupaten Kampar**

Komite Sekolah atau Madrasah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarki dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Peran komite madrasah pada tahap awal pembentukannya disambut dengan sangat positif oleh sebagian besar masyarakat, dengan harapan yang tinggi pula. Sebab komite sekolah atau madrasah berperan 1) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) yakni memberikan pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, 2) Pendukung (*Supporting agency*), 3) Pengontrol (*controlling agency*), dan 4) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya atau implementasinya pada sebagian satuan pendidikan masih terdapat kekurangan dan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peran komite sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Lipat Kain dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peran tersebut.

Subjek penelitian adalah pengurus komite MTs Negeri Lipat Kain sedangkan objek penelitian adalah implementasi atau pelaksanaan peran komite sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak madrasah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus komite MTs Negeri Lipat Kain yang berjumlah 32 orang. Karena populasi tidak begitu besar maka penulis menggunakan total sampling, yaitu seluruh populasi diteliti. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik angket. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan persentase.

Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa 1) Implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar tergolong cukup optimal. Secara persentase, implementasi peran komite tersebut 73,86%. 2) Faktor-faktor yang mendukung implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar antara lain a. faktor pendidikan, bahwa sebagai besar pengurus komite berpendidikan sarjana dan SLTA. b. Faktor ekonomi yang mencukupi, dan c. Faktor adanya kesempatan untuk melaksanakan perannya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang peran pengurus komite sekolah/madrasah di kalangan pengurus komite MTs Negeri Lipat Kain.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGHARGAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	8
C. Permasalahan .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II    KERANGKA TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Konsep Teoretis .....	12
B. Penelitian yang Relevan .....	23
C. Konsep Operasional .....	24
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	26
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	26
C. Populasi dan Sampel .....	26
D. Teknik Pengumpulan Data .....	26
E. Teknik Analisa Data .....	27
<b>BAB IV   PENYAJIAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Deskripsi MTs Negeri 1 Lipatkain.....	29
B. Penyajian Data .....	36
C. Analisa Data.....	56
<b>BAB V    PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keadaan guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar .....	32
Tabel 2	Keadaan siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun Ajaran 2010/2011.....	34
Tabel 3	Sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	35
Tabel 4	Frekuensi pemberian masukan, pertimbangan atau rekomendasi dalam rangka penyusunan kebijakan pendidikan .....	37
Tabel 5	Frekuensi pemberian masukan dan pertimbangan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar .....	37
Tabel 6	Pemberian pertimbangan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.....	38
Tabel 7	Frekuensi hadir dalam rangka rapat-rapat tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) .....	39
Tabel 8	Komite memberikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi kepada pihak madrasah mengenai kriteria tenaga guru.....	40
Tabel 9	Komite memberikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi kepada pihak madrasah mengenai kriteria tenaga administrasi .....	40
Tabel 10	Pemberian pertimbangan mengenai kriteria fasilitas pendidikan....	41
Tabel 11	Pengurus komite mendorong orang tua berpartisipasi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.....	42
Tabel 12	Komite mendorong dunia industri/usaha dalam pengadaan sarana prasarana serta biaya pendidikan .....	43
Tabel 13	Komite ikut membantu madrasah dalam penggalangan dana masyarakat .....	43
Tabel 14	Komite mendorong masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana serta biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu..	44
Tabel 15	Komite madrasah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri Lipatkain.....	45

Tabel 16	Komite ikut meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa terutama setelah selsesai mengikuti Ujian Nasional .....	45
Tabel 17	Komite ikut mencari penyebab ketidak berhasilan belajar siswa....	46
Tabel 18	Kerjasama yang harmonis pihak komite dengan masyarakat .....	47
Tabel 19	Komite menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebututuhan pendidikan yang ajukan oleh masyarakat .....	47
Tabel 20	Komite menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebututuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat .....	48
Tabel 21	Komite madrasah memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran di MTs Negeri Lipatkain .....	49
Tabel 22	Pendapat responden bahwa tanpa komite MTs Negeri Lipatkain pun juga bisa maju .....	49
Tabel 23	Keikutsertaan komite dalam menentukan program sekolah.....	50
Tabel 24	Keikutsertaan komite madrasah dalam memberikan pertimbangan tentang peningkatan kesejahteraan guru .....	50
Tabel 25	Keikutsertaan komite dalam memberikan pertimbangan dalam hal perekrutan guru-guru honorer .....	51
Tabel 26	Pendidikan terakhir pengurus komite .....	52
Tabel 27	Kesempatan untuk hadir setiap kali diundang rapat .....	52
Tabel 28	Pengurus komite bekerja, sehingga tidak memiliki waktu untuk berperan aktif sebagai komite .....	53
Tabel 29	Penghasilan pengurus komite dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.....	54
Tabel 30	Meninggalkan kerja karena memenuhi undangan rapat komite madrasah.....	54
Tabel 31	Rekapitulasi jawaban responden tentang peran komite sebagai pemberi pertimbangan ( <i>advisory agency</i> ) di MTs Negeri Lipat Kain.....	58

## **DAFTAR BAGAN**

Struktur Organisasi MTs Negeri Lipat Kain .....	31
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peluang berpartisipasi tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas madrasah serta tokoh masyarakat, dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen madrasah.

Peran komite sekolah/madrasah menjembatani kepentingan di antara masyarakat dan penyelenggaran pendidikan. Seperti ketika ada keluhan masyarakat yang masuk, ada keengganan pihak sekolah memanfaatkannya sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan, pada tingkat apa dan bagaimana dialog dengan publik harus dilaksanakan dan sebagainya. Maka di sinilah posisi dan peran komite sekolah/madrasah yang perlu dimainkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen No. 14 Th. 2005 Bab XV, bagian kesatu pasal 54 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna



hasil pendidikan”.<sup>1</sup> Kemudian pada pasal 56 ayat 1 dinyatakan pula bahwa: “Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah”.<sup>2</sup>

Mulyasa menyatakan:

Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi juga (melalui Komite Madrasah dan Dewan Pendidikan) merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Masyarakat dan orang tua menjalin kerja sama untuk memberikan bantuan, pemikiran serta menjadi narasumber pada berbagai kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.<sup>3</sup>

Komite Sekolah atau Madrasah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarki dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya.<sup>4</sup>

Secara umum peran Komite Sekolah atau Madrasah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 adalah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Konsep pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah yang terkandung di dalamnya memerlukan pemahaman berbagai pihak terkait, terutama menyangkut di

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Perundang-undangan Guru dan Dosen*, Bandung, Fokus Media: 2005, h. 84

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 85

<sup>3</sup> Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung, Rosdakaya: 2002, h. 28

<sup>4</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 47

mana posisinya dan apa manfaatnya. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan ini dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan tidak hanya dalam bentuk konsep dan wacana, tetapi lebih pada *action* di lapangan.

Pada dasarnya posisi komite sekolah/madrasah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Peran komite sekolah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.

Berdasarkan peran komite madrasah tersebut, maka pada tahap awal pembentukannya, komite madrasah disambut dengan sangat positif oleh sebagian besar masyarakat, dengan harapan yang tinggi pula. Namun ironisnya, pada perkembangan praktek di lapangan ditemukan beberapa fenomena penting, seperti adanya ketidakjelasan peran komite madrasah dan ketidakberdayaan. Penyebabnya antara lain, karena pelaksanaan peran komite madrasah tidak selalu memenuhi harapan. Padahal eksistensinya sangatlah penting dan strategis, yakni 1) memberikan pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di suatu pendidikan, 2) mendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan, 3) mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di suatu

pendidikan, 4) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di antara pendidikan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan peran komite madrasah masih sangat variatif. Di satu pihak ada komite madrasah yang masih melanjutkan peran BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) yang sering disebut sebagai “stempel” kepala madrasah. Artinya, komite madrasah seperti hanya “mengekor” apa yang diprogramkan oleh kepala madrasah. Komite madrasah tidak memiliki ide kreatif dan gagasan inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi program kepala madrasah itulah yang menjadi program komite madrasah. Sebaliknya ada pula komite madrasah yang justru sangat ditakuti oleh kepala madrasah. Kedudukan sebagai kepala madrasah sering menjadi incaran kritik dan pengawasan secara berlebihan oleh komite madrasah apalagi jika kepala madrasah tersebut melaksanakan tugasnya secara tidak transparan, demokratis dan akuntabel. Jika kepala madrasah jelas-jelas melakukan penyelewengan maka komite madrasah ini tidak segan-segan lagi mengajukan rekomendasi kepada dinas pendidikan untuk mengganti kepala sekolah tersebut.

Peran sebagai badan pengawas lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Bahkan di beberapa madrasah keberadaan lembaga ini justru menjadi saingan kepala madrasah dalam menentukan kebijakan madrasah.

Adapun kedudukan komite madrasah adalah:

Komite sekolah di SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, berkedudukan sebagai lembaga mandiri yang diluar struktur organisasi SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau lazim disebut dengan

---

<sup>5</sup> Hilman Hidayat, *Apakah yang Telah Kau Capai Komite Sekolah?* <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/pendidikan/139-apa-yang-kaucapai-komite-sekolah.html>, diakses tanggal 18 Februari 2012

organisasi nonstruktural, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK sebagai mitra kerja unsur pimpinan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK.<sup>6</sup>

Dinyatakan secara tegas, bahwa komite madrasah merupakan lembaga mandiri dan bersifat independen. Kedudukan komite madrasah tidak di bawah kepala sekolah madrasah atau di bawah bayang-bayang kekuasaan kepala madrasah, namun kedudukan komite madrasah adalah sebagai mitra kerja kepala madrasah. Berdasarkan kenyataan tersebut, komite madrasah akan bisa melaksanakan perannya secara optimal jika didukung oleh kepala madrasah. Dukungan yang dimaksud disini adalah kepala madrasah memberikan ruang untuk komite madrasah dalam melaksanakan perannya sehingga akan tercipta hubungan yang sinergis diantara keduanya.

Mulyasa menjelaskan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah, maka kepala sekolah harus melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan-masukan untuk menyusun program yang relevan. Di sisi lain, masyarakat juga memerlukan jasa sesuai dengan yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat terjadi, jika kepala sekolah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan.<sup>7</sup>

Hubungan antara kepala madrasah dengan komite madrasah yang dibangun dengan baik akan membawa pengaruh positif bagi komite madrasah dalam mengadakan sumber-sumbernya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberi fasilitas-fasilitas

---

<sup>6</sup>Sukurno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 16.

<sup>7</sup> Enco Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 163

bagi guru-guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif.

Komite madrasah bisa ikut serta untuk meneliti berbagai permasalahan belajar yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun secara individual, sehingga membantu guru-guru untuk menerapkan pendekatan belajar yang tepat bagi murid-muridnya. Komite madrasah juga dapat menyampaikan ketidakpuasan para orangtua murid akan rendahnya prestasi yang dicapai oleh suatu madrasah.<sup>8</sup>

Bagaimana pelaksanaan peran komite sekolah saat ini di lapangan, yang memang sangat diharapkan oleh kedua belah pihak, perlu diungkapkan secara apa adanya. Sebab kenyataan di lapangan, banyak institusi atau lembaga pendidikan belum dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat pengguna, lebih-lebih lagi lembaga pendidikan yang berstatus swasta yang berada di pelosok-pelosok desa. Kondisi seperti ini jelas memerlukan peran dalam bentuk *action* dari komite sekolah, baik dari segi manajemen maupun kelancaran kegiatan pembelajaran. Karena itu, penelitian tentang peran komite menarik dilakukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan peran komite sekolah serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran tersebut.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Lipat Kain adalah salah satu lembaga pendidikan di Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Sebagai lembaga pendidikan menengah formal, MTs Negeri Lipat

---

<sup>8</sup> Ace Suryadi, *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Mewujudkan Sekolah-Sekolah yang Mandiri dan Otonom*, [http://www.depdiknas.go.id/serba\\_serbi/dpks/pemberdayaanDPKS.html](http://www.depdiknas.go.id/serba_serbi/dpks/pemberdayaanDPKS.html), diakses tanggal 20 Februari 2012

Kain mempunyai Komite Madrasah yang terbentuk sejak tahun 2008.

Berdasarkan pengamatan penulis ditemukannya gejala-gejala sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan RAPBS, Komite Madrasah kurang berperan, sehingga rapat-rapat yang membicarakan RAPBS MTs Negeri Lipat Kain hanya dihadiri oleh sebagian kecil pengurus dan anggota komite madrasah.
2. Menurut salah seorang guru MTs Negeri Lipat Kain, Komite Madrasah jarang melakukan kontrol atau pengawasan dalam kelengkapan sarana prasarana terhadap penyelenggaraan pembelajaran.<sup>9</sup>
3. Upaya MTs Negeri Lipat Kain mendapatkan bantuan dana dari pihak pemerintah, sering dilakukan hanya oleh kepala madrasah saja, tanpa bantuan komite.
4. Dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah, fungsi komite Madrasah tidak berjalan dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan MTs Negeri Lipat Kain belum begitu optimal dalam memberi pertimbangan terhadap kegiatan sekolah.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **Implementasi Peran Komite Madrasah Sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain Kabupaten Kampar.**

---

<sup>9</sup> Syukri, Guru MTs Desa sawah, *Wawancara*, tanggal 2 April 2011

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah teknis yang berkenaan dengan judul penelitian ini.

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.
2. Peran, artinya: “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.<sup>10</sup> Peran yang di maksud disini adalah perangkat tingkah atau tugas yang diharapkan dimiliki atau dilaksanakan oleh Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar.

### 3. Komite Madrasah

Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah, baik pada pendidikan prasekolah maupun pendidikan dasar dan menengah.<sup>11</sup>

4. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) adalah salah satu peran dari komite sekolah atau madrasah. Selain sebagai pihak yang bertugas memberikan pertimbangan, komite sekolah atau madrasah juga memiliki peran-peran lain, yaitu sebagai pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka: 2003, h. 853

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 10

Dengan demikian yang dimaksud dengan implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain adalah pelaksanaan tugas-tugas komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak madrasah demi kelancaran proses pendidikan dan pengajaran dan pencapaian visi dan misi madrasah.

### **C. Permasalahan**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

- a. Peran Komite Madrasah Negeri Lipat Kain Kabupaten Kampar sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) belum diimplementasikan secara optimal.
- b. Peran Komite Madrasah Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar sebagai pengontrol (*controlling agency*) penyelenggaraan dan keluaran pendidikan belum diimplementasikan secara optimal dalam bentuk hasil belajar siswa dan penyebab ketidak berhasilan belajar siswa.
- c. Terdapat sejumlah faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peran Komite Madrasah di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar yang perlu diidentifikasi lebih jauh seperti partisipasi seseorang dan faktor penghambat tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi.
- d. Keterlibatan Komite Madrasah dalam merencanakan kebijakan-kebijakan di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar belum maksimal.



- e. Pembinaan terhadap Komite Madrasah di MTs Negeri Lipat Kain belum efektif.

## **2. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang menuntut jawaban penelitian dan karena keterbatasan kemampuan penulis untuk meneliti seluruhnya, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti dengan memfokuskannya hanya pada implementasi peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peran tersebut.

## **3. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar?
- b. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan penulis dalam manajemen pendidikan.
- b. Sumbangan informasi bagi komite madrasah mengenai implementasi peran komite sebagai pemberi pertimbangan.
- c. Sebagai sumbangan penulis kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Strata satu pada jurusan Kependidikan Islam Prodi Manajemen Pendidikan Islam sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Teoretis

##### 1. Komite Sekolah/ Madrasah

Dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 22 April 2002 dijelaskan bahwa: Komite Sekolah/Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. "Komite Madrasah merupakan forum pengambilan keputusan bersama antara madrasah dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh madrasah"<sup>1</sup>

Pelibatan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan sangat diperlukan dan diharapkan tidak sekedar dalam bentuk konsep dan wacana saja tetapi lebih pada *action* yang perlu segera direalisasikan. Pentingnya hal ini direspon pemerintah dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai dewan Sekolah dan Komite Sekolah yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Dalam Propenas tersebut pada butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Respon pemerintah selanjutnya

---

<sup>1</sup> Sri Renani Pantjastuti dkk, *Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat, 2008), h. 75

direalisasikan dengan dikeluarkannya SK Mendiknas NO 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah.

Awal sosialisasi Komite Madrasah ini mengalami hambatan karena beberapa kalangan menganggap Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah tersebut hanya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Hal ini terjadi karena Kepmen tersebut tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan di negeri ini sehingga bisa saja dikalahkan oleh Peraturan Daerah ditingkat Kabupaten/Kota. Tetapi masalah tersebut selesai karena masalah Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah ini secara eksplisit telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 56 ayat 2).

Pada dasarnya Komite Madrasah lahir dari kebutuhan-kebutuhan pendidikan akan partisipasi masyarakat. Keluarga, madrasah, dan masyarakat memiliki pola hubungan yang sangat rapat dan seharusnya bersatu padu secara sinergis dalam melaksanakan misi mencerdaskan bangsa. Bila dahulu kita mengenal Badan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), dan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), maka sebagai penyempurna institusi tersebut, sekarang telah ditemukan bentuknya yang lebih ideal, yaitu Komite Madrasah. Meski peran BP3 memang tidak hanya dalam aspek pemberian bantuan dalam bidang finansial atau keuangan, tetapi dalam praktik dilapangan peran BP3

memang terbatas kepada peran finansial saja. Bahkan peran inilah yang menjadi stigma yang melekat pada BP3.<sup>2</sup>

Komite Madrasah selain merupakan lembaga independen, juga mempunyai peran dan aspek yang lebih luas dari sekadar penggalang dana. Komite Madrasah ini secara formal difungsikan sebagai pengambil keputusan bersama antara madrasah dan masyarakat dalam hal perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh madrasah. Jadi Komite Madrasah bukanlah tranformasi dari POMG dan BP3, Komite Madrasah sebagai penyempurna institusi tersebut mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada POMG dan BP3 dan Komite Madrasah ini sangat berbeda dengan Komite Sekolah Jaringan Pengaman sekolah (KS-JPS).

Kebijakan tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah ini merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang lebih demokratis, transparan dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat.

## **2. Nama, Kedudukan dan Sifat Komite Madrasah**

### **a. Nama**

Nama lembaga yang disebutkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 adalah Dewan Sekolah ditingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Dalam Kepmen 004/U/2002 juga dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

---

<sup>2</sup> Sri Renani Pantjastuti dkk, *Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat, 2008), h.. 63

nama itu menjadi Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Meskipun demikian, nama Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dikenal dengan nama generik, yakni nama yang bersifat umum, yang dalam praktik dilapangan, daerah dan atau satuan pendidikan dapat menggunakan nama lain, berdasarkan kesepakatan rapat pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.<sup>3</sup>

Mengenai nama badan yang tidak sama telah diatur dalam SK Mendiknas Nomor 044/U/2002 butir 1.2 yang berbunyi:

Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Komite Sekolah, Komite Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.<sup>4</sup>

b. Kedudukan

Komite Madrasah dapat dibentuk dengan 2 alternatif kedudukan.

*Pertama*, berkedudukan disatu sekolah yang bersangkutan. Artinya, Komite Madrasah ini dibentuk untuk sekolah yang bersangkutan saja. *Kedua*, dapat dibentuk disatu kompleks persekolahan yang terdiri dari beberapa sekolah, baik jenjang maupun jenisnya.<sup>5</sup> Hal tersebut juga dijelaskan dalam lampiran II Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 78 -79

<sup>4</sup> Mendiknas, SK NO 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan & Komite Madrasah, Jakarta: 2002.

<sup>5</sup> Sri Renani Pantjastuti dkk, *Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat, 2008), h. 80

Pada setiap madrasah terdapat satu Komite Madrasah. Dalam hal terdapat beberapa madrasah pada satu lokasi, atau beberapa madrasah yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk Koordinator Komite Madrasah.”<sup>6</sup>

c. Sifat

Dalam Lampiran II Kepmendiknas tentang sifat Komite Madrasah disebutkan: ”Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan hubungan pemerintahan.”<sup>7</sup>

Jadi Komite madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri, bersifat independen dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun dengan lembaga pemerintahan lainnya. Komite Sekolah dan sekolah itu memiliki kemandirian masing-masing tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).<sup>8</sup> Selain itu perlu juga ditegaskan bahwa kedudukan Komite Madrasah tidak dibawah Kepala Madrasah ataupun dibawah bayang-bayang kekuasaan Kepala Madrasah. Kedudukan Kepala Madrasah terhadap Komite Madrasah ini sama sekali tidak sebagai ”pembina” seperti kedudukan BP3 pada era sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Mendiknas, SK NO 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan & Komite Madrasah, Jakarta: 2002.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Komite Madrasah*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), h..13

### 3. Tujuan Komite Madrasah

Tujuan dibentuknya Komite Madrasah adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.<sup>9</sup>

### 4. Peran dan Fungsi Komite Madrasah

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, peran Komite Sekolah/Komite Madrasah adalah:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*



- 2) Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah.
  - 3) Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah.
  - 4) Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
  - 5) Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
  - 6) Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan.
  - 7) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah.
  - 8) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.
- b. Pendukung (*Supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- 1) Mengadakan pertemuan secara berkala dengan *stakeholders*, di lingkungan sekolah.

- 2) Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
  - 3) Memotivasi masyarakat kalangan menengah keatas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
  - 4) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti: Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri dalam penyediaan sarana/prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu dan ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah.
- c. Pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiata sebagai berikut:
- 1) Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolah.
  - 2) Mencari penyebab ketidak berhasilan belajar siswa dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa.

Komite Madrasah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholders* secara priodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban

bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

d. Mediator antara pemerintah (eksekutif), dengan masyarakat di satuan pendidikan, seperti:

- 1) Melakukan kerja sama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah, dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dengan cara membina hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh *stakeholders* pendidikan di sekitar sekolah dan mengadakan peninjauan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain di luar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah.
- 2) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dalam bentuk: menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari *stakeholders* pendidikan di sekitar sekolah dan menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolahnya.

## 5. **Kepengurusan**

Komite Madrasah bukanlah lembaga birokrasi baru. Kedudukan Komite Madrasah sama sekali tidak berada dibawah atau diatas Kepala Madrasah, melainkan sejajar. Komite madrasah juga bukan merupakan

institusi pemerintahan, yang harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Atasan langsung Komite Madrasah adalah orang tua dan masyarakat. Komite Madrasah adalah badan mandiri yang menjadi wadah peran serta orang tua dan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di madrasah dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan tersebut.

Dalam lampiran II Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 disebutkan:

- a. Pengurus Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - 1) Ketua,
  - 2) Sekretaris, dan
  - 3) Bendahara;
- b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
- c. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.

Jadi kepengurusan Komite Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Komposisi pengurus dan keanggotaan Komite Madrasah dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan madrasah yang bersangkutan.<sup>10</sup> Pengurus harus dipilih dari anggota.

## 6. Keanggotaan

Anggota Komite Madrasah merupakan representasi dari orang tua dan masyarakat. Dalam lampiran II Kepmendiknas disebutkan bahwa Komite Madrasah berasal dari 2 unsur yaitu: Unsur masyarakat yang terdiri dari:

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 96

- a. Orang tua/wali peserta didik,
- b. Tokoh masyarakat,
- c. Tokoh pendidikan,
- d. Dunia usaha/industri,
- e. Organisasi profesi tenaga pendidikan,
- f. Wakil alumni, dan
- g. Wakil peserta didik.

Anggota Komite Madrasah juga berasal dari unsur dewan guru, yayasan / lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Madrasah (maksimal 3 orang). Anggota Komite Madrasah sekurang-kurangnya berjumlah 9 orang dan jumlahnya gasal atau ganjil.

#### **7. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komite Madrasah Sebagai Pemberi Pertimbangan**

Tingkat partisipasi seseorang dalam menjalankan perannya berbeda-beda, namun dalam pelaksanaannya tingkat partisipasi seseorang dalam menjalankan perannya dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
- b. Penginterpretasian yang dangkal.
- c. Kecenderungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi.

- d. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi.<sup>11</sup>

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Santi Marni, pada tahun 2006, meneliti tentang Upaya Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatunnajah Desa Teluk Merbau, hasil penelitiannya menunjukkan Manajemen Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatunnajah Desa Teluk Merbau dikategorikan sedang.
2. Khairiah Elnita, mahasiswi Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2009 meneliti tentang Upaya Komite Madrasah Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Aliyah Al Islam Kuntu Darussalam Kabupaten Kampar. Penelitiannya berusaha mengetahui bagaimana upaya Komite Madrasah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Aliyah Al Islam Kuntu Darussalam. Hasil penelitiannya menunjukkan Upaya Komite Madrasah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Aliyah Al Islam Kuntu Darussalam tergolong cukup maksimal.

Meskipun Santi Marni dan Khairiah Elnita sama-sama meneliti tentang Komite Madrasah seperti penelitian yang akan penulis lakukan, namun dari segi substansi terdapat perbedaan mendasar. Santi Marni

---

<sup>11</sup> R.A. Santoso Putro, *Partisipasi Komunikasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni: 1988, h. 13

meneliti tentang upaya Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatunnajah Desa Teluk Merbau, sedangkan penulis meneliti tentang implementasi peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan di MTs Negeri Lipat Kain. Demikian pula Khairiah Elinita, beliau meneliti tentang upaya komite Madrasah Madrasah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Aliyah Al Islam Kuntu Darussalam, sedangkan penulis meneliti tentang implementasi peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan di MTs Negeri Lipat Kain Kabupaten Kampar.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa secara khusus penelitian terhadap implementasi peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

### **C. Konsep Operasional**

1. Peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan Konsep operasional ialah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teori, hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam tulisan ini. Untuk mengukur peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan, indikator yang digunakan adalah:
  - a. Komite Madrasah mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.

- b. Komite Madrasah menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah.
  - c. Komite Madrasah menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah.
  - d. Komite Madrasah memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
  - e. Komite Madrasah memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
  - f. Komite Madrasah memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan.
  - g. Komite Madrasah memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah.
  - h. Komite Madrasah memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan yaitu:
- a. Latar belakang pendidikan pengurus komite.
  - b. Pengetahuan atau pemahaman pengurus komite tentang eksistensi komite sekolah/madrasah.
  - c. Waktu atau kesibukan pengurus komite
  - d. Keadaan ekonomi pengurus komite.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 (empat ) bulan yakni dari bulan Maret sampai Juni 2012 bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar.

##### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pengurus komite MTs Negeri Lipat Kain sedangkan objek penelitian ada implementasi atau pelaksanaan peran komite sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak madrasah.

##### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus komite MTs Negeri Lipat Kain yang berjumlah 32 orang. Karena populasi tidak begitu besar maka penulis menggunakan total sampling, yaitu seluruh populasi diteliti.

##### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Angket. Teknik ini dilaksanakan dengan menyebarkan pertanyaan tertulis kepada responden, dalam hal ini adalah pengurus komite MTs Negeri Lipat Kain. Teknik angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan di MTs Negeri Lipat Kain dan juga untuk mengumpulkan data tentang

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peran tersebut.

2. Wawancara. Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya MTs Negeri Lipat Kain dan data lain yang belum terkumpul melalui angket.
3. Observasi. Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan MTs Negeri Lipat Kain, baik menyangkut keadaan gedung, sarana prasarana yang ada maupun keadaan guru dan siswa.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif akan dianalisis secara deskriptif naratif sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan persentase<sup>1</sup>. Adapun rumus deskriptif kuantitatif dengan persentase adalah:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

**Keterangan:**

P = Persentase yang dicari

F = Frekuensi hitung

N = Frekuensi harapan

Persentase akhir diklasifikasikan ke dalam tiga kategori beserta tafsirannya yaitu:

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta : 2007, hlm. 213

1. 76 % - 100 % = Peran komite madrasah maksimal
2. 50 % - 75 % = Peran komite madrasah cukup maksimal
3. 0 % - 49 %<sup>2</sup> = Peran komite madrasah kurang maksimal

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Umum MTs Negeri Lipatkain**

##### **1. Sejarah Berdirinya**

Madrasah ini berdiri pada tahun pelajaran 1955/1956 dengan nama sekolah menengah pertama islam (smpi) dengan kepala sekolah Bapak Ahmad (bapak guru amat), pada tahun pelajaran 1958/1959 berubah nama dari smpi menjadi pgap (pendidikan guru agama pertama) dengan kepala sekolah Bapak Abdul Aziz dan kemudian diteruskan oleh Bapak Almuis, An, pada tahun pelajaran 1968/1969 ditukar lagi menjadi PGAN 4 tahun, selanjutnya, berdasarkan piagam dari Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau No. b.III/16/1980 yang terhitung tanggal 10 desember 1977 sekolah ini berubah lagi menjadi MTs Swasta Lipatkain dengan Kepala Madrasah Bapak Abdul Munir, seterusnya Bapak Abdul Wahid Rata. pada tahun pelajaran 1993/1994 berubah namanya menjadi MTs YPIK lipatkain dengan kepala madrasah bapak Drs. Akhyar setelah habis masa tugas dilanjutkan oleh Bapak Nasruddin, BA dan mulai bulan februari 1998 digantikan oleh Bapak Sutan Mansur, A.Md. setelah mengalami proses selama tiga tahun berdasarkan surat keputusan bapak menteri agama republik Indonesia no: 558 tahun 2003 tanggal 30 desember 2003 menjadi negeri, dan pada tanggal 30 juni 2004 baru diresmikan.

Karena masa jabatan Kepala Madrasah habis (pensiun) pada tanggal 31 Desember 2004, maka jabatan kepala digantikan oleh Bapak Martapuri.

M. Ma sejak tanggal 01 maret 2005 sampai sekarang.

Tokoh pendiri MTs Lipat Kain yitu:

1. Periode 1955 s/d 1956 Bapak Ahmad (SMPI)
2. Periode 1956 s/d 1958 Bapak Teuku Nawawi (SMPI)
3. Periode 1958 s/d 1959 Bapak Abdul Aziz (PGAP)
4. Periode 1960 s/d 1967 Bapak Almuis, AN (PGAP)
5. Periode 1968 s/d 1969 Bapak Maran Umar (PGAN 4 dan PGAN 6)
6. Periode 1981 s/d 1993 Bapak Abdul Wahid Rata (MTs Swasta Lipatkain)
7. Periode 1994 s/d 1997 Bapak Drs. Akhyar (MTs YPIK Lipatkain)
8. Periode 1994 s/d 1997 Bapak Nasruddin, BA (MTs YPIK Lipatkain)
9. Periode 1998 s/d 2004 Bapak Sutan Mansur, A.Md (MTs YPIK / MTs Lipatkain)
10. Periode 2005 s/d Sekarang Bapak Martapuri. M. MA (MTs Lipatkain)

## **2. Visi dan Misi**

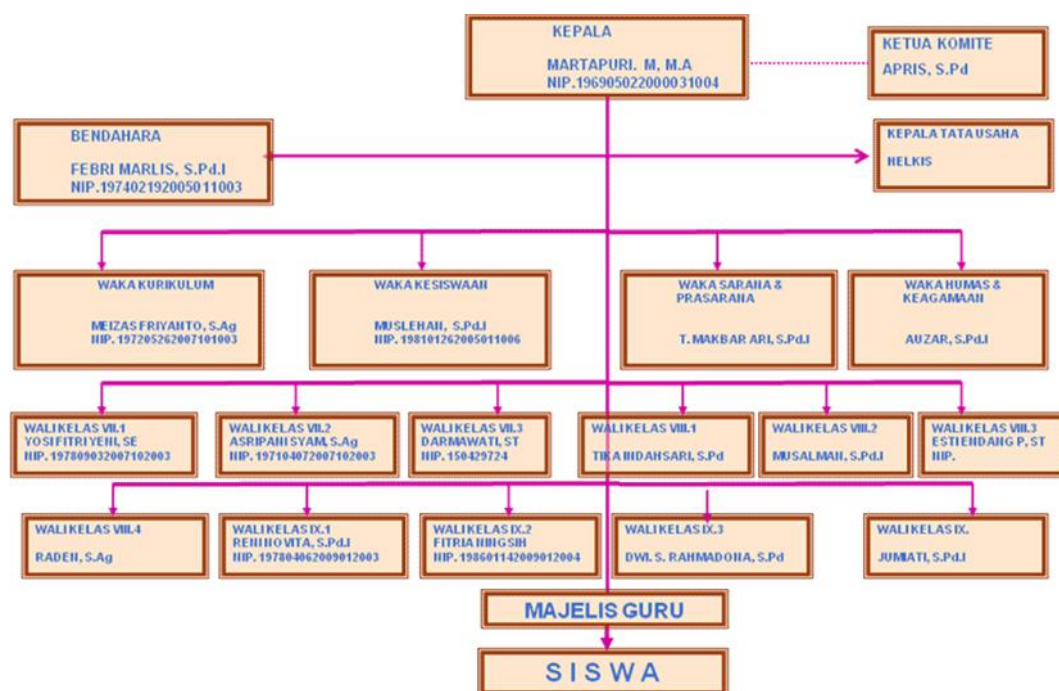
Visi : Terwujudnya siswa yang berprestasi dibidang imtaq dan iptek.

Misi:

- a. Meningkatkan disiplin Madrasah dengan kesadaran yang tinggi
- b. Mewujudkan lembaga pendidikan yang islami dan berkualitas
- c. Menciptakan tenaga pendidik yang profesional dan berdedikasi

- d. Meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidik yang menghasilkan lulusan berkualitas
- e. Meningkatkan minat baca siswa serta komponen Madrasah, melalui perpustakaan
- f. Meningkatkan warga Madrasah terhadap Keamanan, Kebersihan, Keindahan, Kerapian, Kerindangan, Kekeluargaan dan Ketertiban (K7)
- g. Mengembangkan minat siswa serta komponen Madrasah terhadap penggunaan teknologi
- h. Menerapkan manajemen Madrasah yang *akuntabel* dan berkualitas

### 3. Strudur Organisasi MTs Negeri Lipatkain



#### 4. Keadaan Guru MTs Negeri Lipatkain

**Tabel 1**  
**KEADAAN GURU MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI LIPATKAIN**  
**KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR**

No	Nama Guru/NIP	Jabatan	Mata Pelajaran yang diajar	Pendidikan Terakhir/ Jurusan
1	MARTAPURI. M 19690502 200003 1 004	Kepala	Fiqih	S2 MPI
2	HJ. ROSMAWATI 19530910 198303 2 002	Guru	ML SKI	D.III PAI
3	MUSLEHAN 19810126 200501 1 006	Guru Wakil Kep	Bhs Inggris	S1 Bhs Inggris
4	MEIZAS FRIYANTO 19720526 200710 1 003	Guru Wakil Kep	Aqidah Akhlak	S1 PAI
5	FEBRI MARLIS 19740219 200501 1 003	Bendahara	Bendahara	S1 PAI
6	ASRIPANI SYAM 19710407 200710 2 003	Guru Wali Kelas	ML Fiqih	S1 Peradilan Agama
7	ESTI ENDANG PRATIWI 19750923 200710 2 001	Guru	IPA Terpadu MTK	S1 Teknik Sipil
8	DARMAWATI 150 429 724	Guru	IPA Terpadu MTK	S1 Teknik Kimia
9	RENI NOVITA 19780406 200901 2 003	Guru	QH & Fiqih TIK	S1 PAI
10	NENI SRIWAHYUNI 19810813 200912 2 002	Guru	Matematika	S1 Matematika
11	YOSI FITRI YENI 19780903 200710 2 003	Guru	IPS Terpadu	S1 Manajemen
12	HARIANI INDRA YULIATI 19841006 201101 2 017	Guru	Bhs Indonesia	S1 Bhs. Indonesia
13	SITI WASKINA 19860606 200901 2 005	Ka. TU	-	S1 Ekonomi Islam
14	AUZAR	Guru	Qur'an Hadist	S1 PAI
15	BUYUNG KURNIAWAN	Guru	Bhs Inggris	S1 Bhs Inggris
16	RADEN	Guru	Bhs Arab	S1 Ahwal Syahsyiyah
17	TEUKU MAKBAR ARI	Guru	TIK	S1 Bhs Inggris

18	DWI .S. RAHMADONA	Guru	IPA Terpadu	S1 PMIPA
19	ASMA HELNI	Guru	Pkn	S1 PKn
20	IMAS MULYATI	Guru	IPS Terpadu	S1 Sosiologi
21	JUMIATI	Guru	SKI SBK	S1 PAI
22	TIKA INDAHSAARI	Guru	PKn SBK	S1 PKn
23	REFLINDA	Guru	Bhs Indonesia	S1 Bhs Indonesia
24	M. SYAMSUARDI	Guru	Penjaskes	SLTA IPS
25	HERIYANTO	Guru	Fiqih Pem. Muhdrh	S1 PAI
26	YENTIVA	Guru	IPS Terpadu	S1 ADM. Negara
27	MUSALMAN	Ka. Pustaka	-	S1 PAI
28	HELKIS	Staf TU	-	SLTA IPS
29	HERLY MANDAYANI	Staf TU	-	SLTA IPS
30	MARJUMIYARTI	Staf TU	-	SLTA IPS
31	SUSI MARLINA	Pustaka	-	S1 PAI
32	IDRUS. M	Penjaga Madrasah	-	SLTA IPS
33	AZRIKO ZEPRI	Satpam	-	SLTA IPS
34	MAIPENDRI	Staf TU	-	SLTA IPS
35	DASRIANTO	Satpam	-	S1 PAI

*Sumber data : Data Statistik Keadaan Guru SMPN 3 Bangkinang.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah seluruh guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri adalah 35 orang. Terdiri atas 26 orang guru dan 6 Staf TU, 1 orang pengelola pustaka dan 2 orang stpam.



## 5. Keadaan Siswa

**Tabel 2**  
**KEADAAN SISWA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI LIPAT**  
**KAIN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR**  
**TAHUN AJARAN 2010/2011**

No	Kelas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	VII	47	61	108
2	VIII	66	75	141
3	IX	63	66	129
	<b>Jumlah</b>	<b>176</b>	<b>202</b>	<b>378</b>

*Sumber data : Buku induk siswa*

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa kelas VII jumlah siswanya yaitu 108 yang terdiri dari 47 siswa laki-laki dan 61 siswa perempuan, pada kelas VIII jumlah siswanya yaitu 141 yang terdiri 66 laki-laki dan 74 perempuan. Kelas IX jumlah siswanya yaitu 129 orang terdiri dari 63 siswa laki-laki dan 66 siswa perempuan.

## 6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang paling penting dalam proses belajar mengajar. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan masyarakat. Dengan memadainya sarana dan prasarana maka guru juga akan tetap selalu semangat dalam mengajar dan mendidik siswa demikian pula halnya dengan siswa. Karena kelengkapan sarana dan prasarana adalah suatu faktor yang sangat mendukung dalam proses pendidikan.

**Tabel 3**  
**SARANA DAN PRASARANA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI**  
**LIPAT KAIN KECAMATAN KAMPAR KIRI**  
**KABUPATEN KAMPAR**

NO	RUANG	PERMANEN			SEMI PERMANEN		
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
	<b>BANGUNAN</b>						
01	Ruang Kelas	6		4			
02	Ruang Kepala	1					
03	Ruang Guru	1					
04	Ruang TU	1					
05	Labor	2					
06	Perpustakaan	1					
07	Ruang Keterampilan						
08	Ruang Kesenian						
09	Ruang BP/BK	1					
10	Ruang UKS				1		
11	Ruang Aula						
12	Masjid/Mushalla	1					
13	Rumah Dinas						
14	Kantin				1		
15	Asrama						
16	WC Guru	2					
17	WC Siswa		3				
	<b>MEUBELAIR</b>						
01	Meja Murid	362	11				
02	Kursi Murid	370	3				
03	Bangku Murid	6					
04	Papan Tulis	11					
05	Meja Guru	5	6				
06	Kursi Guru	7	4				
07	Lemari Guru	6					
08	Mobiler Perpustakaan	49					

*Sumber data : Data statistik sekolah*

## 7. Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain

Pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain yang sekarang ini adalah komite madrasah priode 2012 – 2014 menggantikan pengurus priode sebelumnya yakni priode 2008-2011. Susunan pengurus komite MTs Negeri Lipat Kain yang sekarang ini dikukuhkan melalui surat keputusan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain Nmor:Mts.04.08/HM.01/001/2012 tanggal 11 Januari 2012.

Susunan pengurus terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan anggota yang berjumlah 32 orang. Pengurus komite terdiri dari beberapa unsur, ada yang berasal dari pemuka masyarakat, pemerintah, alumni, pendidik dan wali murid.

### B. Penyajian Data

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka data yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri dari dua maca, *pertama* data tentang implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain dan yang *kedua* data tentang faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain.

Angket disebarakan kepada 32 orang responden. Dari 32 orang responden yang disebarakan angket, semuanya kembali kepada penulis dalam keadaan terisi. Oleh karena itu, penyajian dan analisis data akan penulis

lakukan terhadap 32 eksemplar angket yang telah diisi semuanya oleh responden. Selain angket, data dimaksud dikumpulkan juga melalui wawancara pada hal-hal yang belum dapat dikumpulkan melalui angket. Wawancara penulis lakukan kepada pengurus komite dan juga kepala MTs Negeri Lipat Kain.

**1. Data tentang implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain**

**Tabel 4**  
**FREKUENSI PEMBERIAN MASUKAN, PERTIMBANGAN**  
**ATAU REKOMENDASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN**  
**KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	a. Sering	15	46,88
	b. Kadang-Kadang	10	31,25
	c. Tidak pernah	7	21,87
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 32 orang responden, 46,88% mengatakan memberi pertimbangan dan rekomendasi kepada MTs Negeri Lipat Kain dalam rangka kelancaran kegiatan pembelajaran yaitu sering. Responden yang menjawab kadang-kadang dalam memberi pertimbangan dan rekomendasi yaitu 10 orang (31,25%), sedangkan responden yang menjawab tidak pernah memberi pertimbangan dan rekomendasi kepada MTs Negeri Lipat Kain yaitu 7 orang (21,87%).

**Tabel 5**

**FREKUENSI PEMBERIAN MASUKAN DAN PERTIMBANGAN  
AGAR KEGIATAN PEMBELAJARAN DAPAT  
BERJALAN LANCAR**

No. Item Angket	Alternatif Jawaban	F	Persentase
<b>2</b>	a. Sering	10	31,25
	b. Kadang-Kadang	15	46,88
	c. Tidak pernah	7	21,87
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

MTs Negeri Lipat Kain membutuhkan masukan dan pertimbangan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar, sebagai mana pada tabel di atas menjelaskan jawaban responden terhadap pertimbangan tersebut. Tabel di atas menjelaskan bahwa 10 orang (31,25%) menjawab pemberi masukan dan pertimbangan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar yaitu sering. 15 orang (46,88%) responden menjawab kadang-kadang, sedangkan 7 orang (21,87%) menjawab tidak pernah memberi masukan dan pertimbangan.

**TABEL 6**  
**PEMBERIAN PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN**  
**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA SEKOLAH \ (RAPBS)**

No. Item Angket	Alternatif Jawaban	F	Persentase
<b>3</b>	a. Sering	14	43,75
	b. Kadang-Kadang	12	37,5
	c. Tidak pernah	6	18,75
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) pihak madrasah memerlukan masukan dan pertimbangan, tabel di atas menunjukkan bahwa dari 32 orang responden, 14 orang (43,75%) menjawab sering memberikan masukan dan pertimbangan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Responden menjawab kadang-kadang yaitu 12 orang (37,5%), sedangkan responden yang mengatakan tidak pernah memberikan masukan dan pertimbangan Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yaitu berjumlah 6 orang (18,75%).

**Tabel 7**  
**FREKUENSI HADIR DALAM RANGKA RAPAT-RAPAT**  
**TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)**

No. Item Angket	Alternatif Jawaban	F	Persentase
<b>4</b>	a. Sering	14	43,75
	b. Kadang-Kadang	11	34,38
	c. Tidak pernah	7	21,87
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas menjelaskan bahwa kehadiran dalam rangka rapat tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah MTs Negeri Lipat Kain, dari 32 orang responden yang sering hadir rapat yaitu 14 orang (43,75%), responden yang menjawab kadang-kadang hadir pada rapat yaitu 11 orang (34,38%). Sedangkan responden yang tidak pernah hadir

pada rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah MTs Negeri Lipat Kain yaitu 7 orang (21,87%).

**Tabel 8**  
**KOMITE MEMBERIKAN MASUKAN, PERTIMBANGAN**  
**ATAU REKOMENDASI KEPADA PIHAK MADRASAH**  
**MENGENAI KRITERIA TENAGA GURU**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>5</b>	a. Sering	12	37,5
	b. Kadang-Kadang	12	37,5
	c. Tidak pernah	8	25
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas menjelaskan tentang pemberian pertimbangan atau rekomendasi kepada pihak madrasah mengenai kriteria tenaga guru. Dari 32 orang responden 12 orang (37,5%) menjawab sering, menjawab kadang-kadang 12 orang (37,5%) dan yang menjawab tidak pernah 8 orang (25%).

**Tabel 9**  
**KOMITE MEMBERIKAN MASUKAN, PERTIMBANGAN ATAU**  
**REKOMENDASI KEPADA PIHAK MADRASAH MENGENAI**  
**KRITERIA TENAGA ADMINISTRASI**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>6</b>	a. Sering	15	46,88
	b. Kadang-Kadang	9	28,12
	c. Tidak pernah	8	25
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas menjelaskan komite memberikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi kepada pihak madrasah mengenai kriteria

tenaga administrasi MTs Negeri Lipat Kain yaitu 15 orang (46,88%) menjawab sering. Responden yang menjawab kadang-kadang yaitu 9 orang (28,12%) dan jawaban tidak pernah dari responden yaitu 8 orang (25%).

**Tabel 10**  
**PEMBERIAN PERTIMBANGAN MENGENAI KRITERIA**  
**FASILITAS PENDIDIKAN**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>7</b>	a. Sering	11	34,38
	b. Kadang-Kadang	15	46,88
	c. Tidak pernah	6	18,75
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar, perlu adanya fasilitas atau sarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan, untuk mewujudkannya dibutuhkan masukan dan pertimbangan mengenai kriteria fasilitas pendidikan, sebagaimana tabel di atas menjelaskan tentang komite memberikan masukan dan pertimbangan yaitu 11 orang (34,38%) sering memberikan masukan atau pertimbangan. Responden yang menjawab kadang-kadang memberika masukan dan pertimbangan yaitu 15 orang (46,88%) dan responden tidak pernah memberikan masukan dan pertimbangan mengenai kriteria fasilitas pendidikan yaitu 6 orang (18,75%).



**Tabel 11**

**PENGURUS KOMITE MENDORONG ORANG TUA  
BERPARTISIPASI DALAM PENGADAAN SARANA  
DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>8</b>	a. Sering	12	37,5
	b. Kadang-Kadang	12	37,5
	c. Tidak pernah	8	25
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 32 orang responden, 12 orang (37,5%) responden sering mendorong orang tua siswa berpartisipasi dalam pengadaan sarana prasarana serta biaya pendidikan. Dan 12 orang (37,5%) responden kadang-kadang mendorong orang tua siswa berprestasi dalam pengadaan sara prasarana MTs Negeri Lipat Kain, sedangkan responden yang tidak pernah mendorong orang tua siswa berprestasi dalam pengadaan sara prasarana yaitu 8 orang (25%) responden.

**Tabel 12**

**KOMITE MENDORONG DUNIA INDUSTRI/USAHA DALAM  
PENGADAAN SARANA PRASARANA SERTA  
BIAYA PENDIDIKAN**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>9</b>	a. Sering	13	40,62
	b. Kadang-Kadang	11	34,38
	c. Tidak pernah	8	25
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan diharapkan diperhatikan oleh semua pihak, termasuk dunia industri/ dunia usaha yang ada di sekitar madrasah (misalnya industri batu bata, somel, KPR, penambangan pasir dan dunia lainnya yang ada Lipatkain) sebagaimana pada tabel di atas di jelaskan bahwa 13 orang (40,62%) responden menjawab sering mendorong dunia industri/usaha dalam pengadaan sarana prasarana serta biaya pendidikan. 11 orang (34,38%) responden menjawab kadang-kadang dan responden tidak pernah mendorong dunia industri/usaha dalam pengadaan sarana prasarana serta biaya pendidikan yaitu 8 (25%).

**Tabel 13**  
**KOMITE IKUT MEMBANTU MADRASAH DALAM**  
**PENGALANGAN DANA MASYARAKAT**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>10</b>	a. Sering	15	46,88
	b. Kadang-Kadang	11	34,38
	c. Tidak pernah	6	18,75
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain diperlukan penggalangan dana dari masyarakat, pada tabel di atas telah menjelaskan bahwa responden menjawab sering ikut membantu madrasah Untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain diperlukan penggalangan dana dari masyarakat yaitu 15 oragn (46,88%), dan responden yang menjawab

kadang-kadang ikut membantu madrasah Untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yaitu 11 orang (34,38%), responden yang menjawab tidak pernah 6 orang (18,75%).

**Tabel 14**  
**KOMITE MENDORONG MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN**  
**SARANA PRASARANA SERTA BIAYA PENDIDIKAN BAGI**  
**MASYARAKAT KURANG MAMPU**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>11</b>	a. Sering	9	28,12
	b. Kadang-Kadang	15	46,88
	c. Tidak pernah	8	25
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa komite MTs Negeri Lipat Kain mendorong masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana serta biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dari 32 responden 9 orang (28,12%) menjawab sering dan responden menjawab kadang-kadang ikut mendorong masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana serta biaya pendidikan yaitu 15 orang (46,88%) sedangkan responden yang tidak pernah ikut mendorong masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana serta biaya pendidikan yaitu 8 orang (25%).

**Tabel 15**  
**KOMITE MADRASAH MELAKUKAN PENGAWASAN**  
**TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**DI MTs NEGERI LIPATKAIN**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>12</b>	a. Sering	16	50
	b. Kadang-Kadang	11	34,38
	c. Tidak pernah	5	15,62
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa 13 orang (40,62) sering melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri Lipat Kain patkai, dari jumlah responden terdapat 11 orang (34,38%) menjawab kadang-kadang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sedangkan responden menjawab tidak pernah yaitu 5 orang (15,62%).

**Tabel 16**  
**KOMITE IKUT MEMINTA PENJELASAN SEKOLAH TENTANG**  
**HASIL BELAJAR SISWA TERUTAMA SETELAH SELSESAL**  
**MENGIKUTI UJIAN NASIONAL**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>13</b>	a. Sering	13	40,62
	b. Kadang-Kadang	15	46,88
	c. Tidak pernah	4	12,5
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas menjelaskan bahwa responden sering ikut meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa terutama setelah selsesai mengikuti ujian nasional yaitu 13 orang (40,62%) dan responden menjawab kadang-kadang yaitu 15 orang (46,88%) sedangkan responden yang tidak pernah ikut meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa terutama setelah selsesai mengikuti ujian nasional yaitu 4 orang (12,5%).

**Tabel 17**  
**KOMITE IKUT MENCARI PENYEBAB KETIDAK**  
**BERHASILAN BELAJAR SISWA**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>14</b>	a. Sering	13	40,62
	b. Kadang-Kadang	14	43,75
	c. Tidak pernah	5	15,63
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Penyebab ketidakberhasilan belajar siswa dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa, sebagaimana telah dijelaskan pada tabel di atas yaitu dari 32 responden 13 orang (40,62%) menjawab sering mencari penyebab ketidakberhasilan belajar siswa dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa. 14 orang (43,75%) responden menjawab kadang-kadang seangkan yang menjawab tidak pernah yaitu 5 orang (15,63%).

**Tabel 18**  
**KERJASAMA YANG HARMONIS PIHAK**  
**KOMITE DENGAN MASYARAKAT**

No. Item Angket	Alternatif Jawaban	F	Persentase
<b>15</b>	a. Sering	18	56,25
	b. Kadang-Kadang	11	34,38
	c. Tidak pernah	3	9,37
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 32 responden terdapat 18 orang (56,25%) menjawab sering ikut melakukan kerja sama agar terselenggara pendidikan yang bermutu dan lancarnya kegiatan pembelajaran perlu adanya kerjasama yang harmonis pihak komite dengan masyarakat dan 11 orang (34,38%) menjawab kadang-kadang sedangkan responden menjawab tidak pernah ikut melakukan kerja sama dengan masyarakat yaitu 3 orang (9,37%).

**Tabel 19**  
**KOMITE MENAMPUNG ASPIRASI, IDE, TUNTUTAN DAN**  
**BERBAGAI KEBUTUTUHAN PENDIDIKAN YANG**  
**AJUKAN OLEH MASYARAKAT**

No. Item Angket	Alternatif Jawaban	F	Persentase
<b>16</b>	a. Sering	16	50
	b. Kadang-Kadang	10	31,25
	c. Tidak pernah	6	18,75
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas menjelaskan dari 32 jumlah responden terdapat 16 orang (50%) menjawab sering menampung aspirasi, ide, tuntutan dan

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dan 10 orang (31,25%) menjawab kadang-kadang sedangkan responden menjawab tidak pernah menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan dari masyarakat yaitu 6 orang (18,75%).

**Tabel 20**  
**KOMITE MENGANALISIS ASPIRASI, IDE, TUNTUTAN DAN**  
**BERBAGAI KEBUTUTUHAN PENDIDIKAN YANG**  
**DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>17</b>	a. Sering	14	43,75
	b. Kadang-Kadang	11	34,38
	c. Tidak pernah	7	21.87
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 32 responden terdapat 14 orang (43,75%) menjawab sering dalam menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dan responden menjawab kadang-kadang dalam menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dari masyarakat yaitu 11 orang (34,38%) sedangkan responden yang menjawab tidak pernah yaitu 7 orang (21.87%).

**Tabel 21**  
**KOMITE MADRASAH MEMILIKI PERANAN PENTING DALAM**  
**MENUNJANG KELANCARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN**  
**DI MTS NEGERI LIPATKAIN**

No. Item Angket	Alternatif Jawaban	F	Persentase
18	a. Penting	17	53,12
	b. Kurang Penting	10	31,25
	c. Tidak penting	5	15,63
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Komite Madrasah memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran di MTs Negeri Lipat Kain sebagaimana pada tabel di atas di jelaskan bahwa 17 orang (53,12%) responden mengatakan penting. Responden yang menjawab kurang penting peranan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran di MTs Negeri Lipat Kain yaitu 10 orang(31,25%) sedangkan responden yang menjawab tidak penting yaitu 5 orang (15,63%).

**Tabel 22**  
**PENDAPAT RESPONDEN BAHWA TANPA KOMITE**  
**MADRASAH PUN MTs NEGERI LIPATKAIN**  
**JUGA BISA MAJU**

No. Item Angket	Alternatif Jawaban	F	Persentase
19	a. Tidak setuju	12	37,5
	b. Kurang setuju	13	40,63
	c. Setuju	7	21.87
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Berdasarkan tabel di atas bahwa 32 orang responden terdapat 12 orang (37,5%) menjawab tidak setuju bahwa tanpa Komite Madrasah pun,



MTs Negeri Lipat Kain juga bisa maju, dan responden menjawab kurang setuju yaitu 13 (40,63%). Sedangkan responden menjawab setuju setuju bahwa tanpa Komite Madrasah pun, MTs Negeri Lipa Lipat Kain tkai juga bisa maju yaitu 7 (21.87%).

**Tabel 23**  
**KEIKUTSERTAAN KOMITE DALAM MENENTUKAN**  
**PROGRAM SEKOLAH**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>20</b>	a. Sering	11	34,38
	b. Kadang-kadang	14	43,75
	c. Tidak Pernah	7	21,87
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Berdasarkan tabel di atas bahwa 32 orang responden terdapat 11 orang (34,38%) menjawab sering, dan responden menjawab kadang-kadang yaitu 14 (43,75%). Sedangkan responden menjawab tidak pernah komite ikut serta dalam menentukan program sekolah MTs Negeri Lipat Kain yaitu 7 (21.87%).

**Tabel 24**  
**KEIKUT SERTAAN KOMITE MADRASAH DALAM**  
**MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TENTANG**  
**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>21</b>	a. Sering	15	46,88
	b. Kadang-kadang	11	34,37
	c. Tidak Pernah	6	18,75
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 32 orang responden terdapat 15 orang (46,88%) menjawab sering ikutserta dalam memberikan pertimbangan bagi peningkatan kesejahteraan guru, dan responden menjawab kadang-kadang yaitu 11 (34,37%). Sedangkan responden menjawab tidak pernah yaitu berjumlah 6 orang (18,75%).

**Tabel 25**  
**KEIKUTSERTAAN KOMITE DALAM MEMBERIKAN**  
**PERTIMBANGAN DALAM HAL PEREKRUTAN**  
**GURU-GURU HONORER**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>22</b>	a. Sering	12	37,50
	b. Kadang-Kadang	9	28,12
	c. Tidak Pernah	11	34,38
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Berdasarkan tabel di atas bahwa 12 orang (37,50%) menjawab sering ikutserta memberikan pertimbangan dalam perekrutan tenaga honorer, 9 orang (28,12) menjawab kadang-kadang dan 11 orang (34,38) responden menjawab tidak pernah.

**2. Data Tentang Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Peran Komite Madrasah Sebagai Pemberi Pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain.**

**Tabel 26**  
**PENDIDIKAN TERAKHIR PENGURUS KOMITE**

No. Item Angket	Alternatif Jawaban	F	Persentase
<b>23</b>	a. Perguruan Tinggi	13	40,62
	b. SLTP/SLTA	11	34,38
	c. SD	8	25
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas menjelaskan bahwa pendidikan keanggotaan komite MTs Negeri Lipat Kain yaitu 13 orang (40,62%) tamatan Perguruan Tinggi, dan responden tamatan SLTP/SLTA yaitu 11 orang (34,38%) sedangkan responden yang tamatan SD yaitu 8 orang (25%).

**Tabel 27**  
**KESEMPATAN UNTUK HADIR SETIAP KALI DIUNDANG RAPAT**

No. Item Angket	Alternatif Jawaban	F	Persentase
<b>24</b>	a. Sering	15	46,88
	b. Kadang-Kadang	9	28,12
	c. Tidak pernah	8	25,00
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Komite Masrasah mengadakan rapat berkala dengan stakeholders (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua murid dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan) sebagaimana pada tabel di atas yaitu 15 orang (46,88%) menjawab sering memiliki kesempatan untuk hadir setiap

kali diundang rapa, responden yang menjawab kadang-kadang memiliki kesempatan untuk hadir setiap kali diundang rapat yaitu 9 orang (28,12%) sedangkan

**Tabel 28**  
**PENGURUS KOMITE BEKERJA, SEHINGGA TIDAK MEMILIKI**  
**WAKTU UNTUK BERPERAN AKTIF SEBAGAI KOMITE**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>25</b>	a. Saya bekerja, namun masih dapat menyisakan waktu untuk berpran aktif	16	50,00
	b. Saya bekerja sehingga kadang-kadang tidak memiliki waktu untuk berperan aktif	9	28,13
	c. Ya, saya bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk berperan aktif	7	21.87
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Peningkatan kesejahteraan guru, misalnya seperti pemberian insentif atau bonus kepada guru yang berasal dari anggaran komite sekolah sebagaimana tabel di atas menjelaskan 16 orang (50,00%) dari jumlah responden menjawab Saya bekerja, namun masih dapat menyisakan waktu untuk berpran aktif pada komite MTs Negeri Lipat Kain. Responden yang menjawab Saya bekerja sehingga kadang-kadang tidak memiliki waktu untuk berperan aktif yaitu sebanyak 9 orang (28,13%) dan 7 orang (21.87%) menjawab Ya, saya bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk berperan aktif dalam Peningkatan kesejahteraan guru, misalnya seperti pemberian insentif atau bonus kepada guru yang berasal dari anggaran komite sekolah

**Tabel 29**  
**PENGHASILAN PENGURUS KOMITE DALAM**  
**MEMENUHI KEBUTUHAN SEHARI-HARI**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>26</b>	a. Lebih dari cukup	20	62,50
	b. Cukup	6	18,75
	c. Tidak cukup	6	18,75
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tiap-tiap orang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana pada tabel di atas di jelaskan bahwa 20 orang (62,50%) responden menjawab lebih dari cukup dan 6 orang (18,75%) menjawab cukup sedangkan responden yang menjawab tidak cukup yaitu 6 orang (18,75%).

**Tabel 30**  
**MENINGGALKAN KERJA KARENA MEMENUHI**  
**UNDANGAN RAPAT KOMITE MADRASAH**

<b>No. Item Angket</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>Persentase</b>
<b>27</b>	a. Sering	14	43,75
	b. Kadang-Kadang	13	40,62
	c. Tidak pernah	5	15,63
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>

Tabel di atas menjelaskan bahwa 14 orang (43,75%) responden menjawab sering meninggalkan pekerjaan karena memenuhi undangan rapat komite madrasah, responden yang mengatakan kadang-kadang meninggalkan pekerjaan karena memenuhi undangan rapat komite yaitu 13 orang (40,62%) sedangkan responden menjawab tidak pernah

meninggalkan pekerjaan karena memenuhi undangan rapat komite madrasah yaitu 5 orang (15,63%).

Selain data faktor-faktor yang berasal dari angket, penulis juga mewawancarai ketua komite madrasah tentang faktor penghambat bagi pengurus komite untuk melaksanakan perannya sebagai pemberi pertimbangan. Ketua pengurus komite madrasah menjelaskan bahwa masalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan para pengurus merupakan penghambat untuk melaksanakan peran secara optimal. Setelah dilantik, belum pernah ada pelatihan atau penataran khusus tentang kerja-kerja pengurus komite.<sup>1</sup>

### C. Analisa Data

#### 1. Implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain

Data tersebut akan di analisis untuk mengetahui bagaimana peran komite sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Lipat Kain Kabupaten Kampar, dapat diperhatikan melalui jawaban responden sebagaimana telah disajikan di atas.

- a. Komite Madrasah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada MTs Negeri Lipat Kain mengenai: Kebijakan pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Data indikator ini disajikan pada tabel 4,5,6,8,9 dan

---

<sup>1</sup>Bapak Apris, S.Pd Ketua Komite MTs Negeri Lipat Kain, *Wawancara*, tanggal 24 Mei 2012.

10. Kehadiran pengurus komite dalam rapat-rapat komite disajikan pada tabel 7.

- b. Peran komite tergolong cukup optimal optimal dapat disimpulkan sebab frekuensi tertinggi jawaban responden ada pada sering dan tidak kadang-kadang. Sedangkan frekuensi terendah ada pada alternatif jawaban tidak pernah. Demikian pula dengan frekuensi kehadiran pengurus komite dalam rapat-rapat, frekuensi tertinggi juga pada kadang-kadang kemudian tertinggi kedua pada alternatif jawaban tidak pernah. Sedangkan frekuensi terendah pada alternatif jawaban sering.
- c. Komite Madrasah MTs Negeri Lipat Kain mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengadaan sara dan prasaran, termasuk dunia industri, pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan. Indikator ini datanya disajikan pada tabel 11,12, 13 dan 14. Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa peran komite madrasah juga kurang optimal. Sebab pada tabel 11, 12,13 dan 14 yang disajikan, frekuensi tertinggi jawaban responden ada pada sering, kemudian tertinggi kedua kadang-kadang dan frekuensi jawaban terendah pada alternatif jawaban tidak pernah.
- d. Komite Sekolah/Komite Madrasah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, penjelasan tentang hasil ujian, mencari penyebab ketidak berhasilan belajar siswa, Indikator ini datanya disajikan pada tabel 15, 16 dan 17, hal ini dapat disimpulkan bahwa peran komite cukup optimal, frekuensinya yang tertinggi yaitu pada

alternatif jawaban sering, tertinggi kedua pada kadang-kadang dan frekuensi terendah pada alternatif jawaban tidak pernah.

- e. Komite Sekolah/Komite Madrasah melakukan kerja sama dengan masyarakat. Untuk indikator ini datanya disajikan pada tabel 18. Dari data yang ada maka disimpulkan bahwa pada indikator ini peran komite madrasah dapat dikatakan cukup optimal, sebab walaupun frekuensi tertinggi ada pada alternatif jawaban kadang-kadang, namun frekuensi tertinggi kedua adalah sering dan frekuensi terendah ada pada alternatif jawaban tidak pernah.
- f. Komite Sekolah/Komite Madrasah menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Indikator ini datanya disajikan pada tabel 19 dan 20. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini peran komite madrasah cukup optimal, sebab frekuensi tertinggi pada kedua tabel tersebut ada pada sering, frekuensi tertinggi kedua ada pada alternatif jawaban tidak kadang-kadang dan frekuensi terendah ada pada alternatif jawaban tidak pernah.

Untuk dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan mengenai peran komite madrasah dalam menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran di MTs Negeri Lipat Kain, maka data akan dianalisis secara kuantitatif persentase. Sebagai langkah awal, data yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel tersebut akan direkap ke dalam suatu tabel rekapitulasi sebagai berikut:



Tabel 31

**REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERAN  
KOMITE SEBAGAI PEMBERI PERTIMBANGAN (*ADVISORY AGENCY*)  
DI MTs NEGERI LIPAT KAIN**

No. item	No. Tabel	Alternatif Jawaban						Jumlah
		A		B		C		
		F	(%)	f	(%)	f	(%)	
1	4	15	46,88	10	31,25	7	21,87	32 (100%)
2	5	10	31,25	15	46,88	7	21,87	32 (100%)
3	6	14	43,75	12	37,5	6	18,75	32 (100%)
4	7	14	43,75	11	34,38	7	21,87	32 (100%)
5	8	12	37,5	12	37,5	8	25	32 (100%)
6	9	15	46,88	9	28,12	8	25	32 (100%)
7	10	11	34,38	15	46,88	6	18,75	32 (100%)
8	11	12	37,5	12	37,5	8	25	32 (100%)
9	12	13	40,62	11	34,38	8	25	32 (100%)
10	13	15	46,88	11	34,38	6	18,75	32 (100%)
11	14	9	28,12	15	46,88	8	25	32 (100%)
12	15	16	50	11	34,38	5	15,62	32 (100%)
13	16	13	40,62	15	46,88	4	12,5	32 (100%)
14	17	13	40,62	14	43,75	5	15,63	32 (100%)
15	18	18	56,25	11	34,38	3	9,37	32 (100%)
16	19	16	50	10	31,25	6	18,75	32 (100%)
17	20	14	43,75	11	34,38	7	21,87	32 (100%)
18	21	17	53,12	10	31,25	5	15,63	32 (100%)
19	22	12	37,5	13	40,63	7	21,87	32 (100%)
20	23	11	34,38	14	43,75	7	21,87	32 (100%)
21	24	15	46,87	11	34,38	6	18,75	32 (100%)
22	25	12	37,50	9	28,12	11	34,38	32 (100%)
Jumlah		297	42,19%	262	37,21%	145	20,60%	32 (100%)

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui jumlah frekuensi pilihan pada masing-masing alternatif jawaban, yaitu:

- a. Alternatif jawaban a terpilih sebanyak = 297 kali
- b. Alternatif jawaban b terpilih sebanyak = 262 kali
- c. Alternatif jawaban c terpilih sebanyak = 145 kali

Selanjutnya frekuensi masing-masing alternatif jawaban dikalikan dengan bobotnya masing-masing untuk dapat diketahui F dan N.

$$1. \text{ Untuk jawaban a} = 3 \times 297 = 891$$

$$2. \text{ Untuk jawaban b} = 2 \times 262 = 524$$

$$3. \text{ Untuk jawaban c} = 1 \times 145 = 145$$

$$704 \quad 1560 (F)$$

$$N = 704 \times 3 = 2112$$

Dengan demikian telah diketahui skor F yaitu 1560 dan skor N 2112 selanjutnya disubstitusikan ke dalam rumus untuk mendapatkan persentase akhirnya. Hasilnya adalah:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{1560}{2112} \times 100\%$$

$$P = 73,86\%$$

Penarikan kesimpulan tentang peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan di MTs Negeri Lipat Kain adalah berdasarkan angka atau skor persentase akhir yang diperoleh, dengan ketentuan atau patokan, apabila angka atau skor persentase yang diperoleh berkisar antara:

a. 76 % - 100 % = Peran komite madrasah maksimal

b. 50 % - 75 % = Peran komite madrasah cukup maksimal

c. 0 % - 49 % = Peran komite madrasah kurang maksimal

Oleh karena persentase akhir yang diperoleh adalah sebesar 73,86%, maka dengan demikian disimpulkan bahwa peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan di MTs Negeri Lipat Kain tergolong **cukup optimal.**

**2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain.**

Peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan di MTs Negeri Lipat Kain sebagaimana hasil analisis di atas adalah cukup optimal. Cukup optimalnya peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan di MTs Negeri Lipat Kain, disebabkan oleh berbagai faktor, ada faktor pendukung dan juga ada faktor penghambat implementasi peran komite.

**a. Faktor Pendukung**

**1) Faktor pendidikan.**

Latar belakang pendidikan pengurus Komite Sekolah atau Madrasah sangat menentukan pola pikir mereka dalam mewujudkan peran dan fungsinya. Dari data yang dikumpulkan sebagaimana tabel 23 diketahui bahwa latar belakang pendidikan pengurus komite madrasah sebagian besar adalah perguruan tinggi 13 orang atau (40,62%) 11 orang atau (34,38%) berpendidikan SLTP/SLTA, hanya 8 orang atau (25,00%) yang berpendidikan tingkat SD. Dengan latar belakang pendidikan pengurus komite

MTs Negeri Lipat Kain tersebut merupakan faktor yang mendukung implementasi peran komite.

2) Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi ini telah disajikan pada tabel 29. Dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengurus komite MTs Negeri Lipat Kain berpenghasilan cukup untuk kebutuhan ekonomi mereka. Namun untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka, mereka harus bekerja dan karena pekerjaannya itu mereka tidak dapat berperan secara optimal dalam komite madrasah. Hal tersebut juga mendukung dalam mengimplementasikan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan

3) Faktor kesempatan untuk hadir setiap kali diundang rapat

Kehadiran dalam undangan rapat komite merupakan faktor pendukung jika anggota komite menghadiri undangan rapat tersebut, kesempatan untuk hadir setiap kali diundang rapat komite sebagaimana pada tabel 24 telah diterangkan bahwa 46,88% sering hadir memenuhi undangan rapat komite, hal ini akan mendukung dalam mengimplementasikan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan. Jika pengurus tidak memiliki kesempatan, tentu tidak dapat mengimplementasikan atau melaksanakan perannya sebagai pemberi pertimbangan.

b. Faktor Penghambat

Meskipun demikian terdapat faktor penghambat implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan di MTs Negeri Lipat Kain, yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam melaksanakan peran pengurus komite. Hal ini disebabkan belum adanya semacam pelatihan atau penataran khusus bagi pengurus komite madrasah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu berikut.

1. Implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar tergolong cukup optimal. Secara persentase, implementasi peran komite tersebut 73,86%.
2. Faktor-faktor yang mendukung implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar antara lain:
  - a. Faktor pendidikan, bahwa sebagai besar pengurus komite berpendidikan sarjana dan SLTA.
  - b. Faktor ekonomi yang mencukupi
  - c. Faktor adanya kesempatan untuk hadir dalam rapat-rapat komite.

Sedangkan faktor penghambat implementasi peran komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) di MTs Negeri Lipat Kain kabupaten Kampar adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang peran pengurus komite sekolah/madrasah di kalangan pengurus komite MTs Negeri Lipat Kain.

## **B. Saran**

1. Komite sekolah MTs Negeri Lipatkain sebagai pemberi pertimbangan guna untuk meningkatkan mutu pendidikan diharapkan agar lebih aktif lagi melaksanakan atau mengimplementasikan perannya sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak madrasah hal bertujuan untuk mendukung pencapaian visi misi MTs Negeri Lipat Kain.
2. Disarankan agar hubungan pengurus komite dengan masyarakat lebih ditingkatkan lagi, agar kerja sama antara pengurus komite dengan masyarakat dapat menghasilkan hal-hal positif bagi perkembangan MTs Negeri Lipat Kain.
3. Disarankan kepada sesama pengurus komite lebih solid lagi dalam menjalankan atau mengimplementasikan peran sebagai pemberi pertimbangan, guna untuk menampung aspirasi masyarakat tentang madrasah. Aspirasi atau pengaduan masyarakat tersebut dapat di jadikan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTs Negeri Lipat Kain pada umumnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Anwar, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang SISDIKNAS*. Jakarta : Departemen Agama RI, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1995
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Komite Madrasah*, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah / Komite Madrasah*, 2006
- Depdiknas, *Partisipasi Masyarakat*, 2001
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, 2006
- Hartono, *Statistik Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Josef Riwu, *Ilmu Sosial Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986
- Kunandar, *Guru Profesional : Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, IKIP, Bandung, 2005
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Remaja Rosdakaya, Bandung, 2002
- R.A. Santoso Putro, *Partisipasi Komunikasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1988
- Poerdawarminta W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1998
- Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2002
- Ridwan, *Pengantar Statiska untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2009



R.A. Santoso Putro, *Partisipasi Komunikasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1988

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Alfabeta Bandung , 2010

Undang-undang RI No. 14 Th.2005, *Himpunan Perundang-undangan Guru dan Dosen*, Fokus Media, Bandung, 2005